

Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2017, *BUMN Persero, Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- HR., Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Jhony, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Ikhsan, Edy dan Mahmud Siregar, 2009, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Indroharto, 1994, *Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismatullah, Deddy, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Jeddawi, Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Kusdarini, Eny, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pasek Diantha, I. Made, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Prajudi Atmosudiredjo, Slamet, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Razy, Fakhrudin 2020, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Pena Persada, Banyumas.
- Salim dan Erlies Septiana, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Samawati, Putu, 2018, *Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Sibue, Hotma P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, PT Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Buku Panduan Mahasiswa, Medan.
- Supramono, Gatot, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Warsito, Herman, 2007, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wibowo, Richo Andi dan Karina Dwi Nugrahati Putri, 2021, *Penugasan Pemerintah kepada BUMN dalam Penyelenggaraan Infrastruktur: Solusi Atau Masalah?.* Dalam Richo Andi Wibowo (Ed.) *Kontrak Pemerintah (Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan)*, Kencana, Jakarta
- Wibowo, Richo Andi, 2022, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pendekatan Perbandingan Hukum*, Gadjah Mada University Press, Jakarta.

Jurnal/Makalah/Arsip

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Perumahan*, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., *PeradilanTata Usaha Negara dalam Konteks UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015.

HK Academy, *Trans Sumatera Toll Road: Accelerating Indonesia's Economic Growth Through Infrastructure Development*, Jakarta, 9 September 2021.

Indriani, Rema Selma, dan Huda, Miftahul, *Analisis Financial Distress pada PT Hutama Karya Sebelum dan Sesudah Proyek Jalan Tol Trans Sumatera*, Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN.

Pratiwi, Cekli Setya, dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Jurnal dibiayai oleh Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dan Center for International Legal Corporation (CILC).

Riyanto, Agus dan Joesoef, Iwan Erar, *Penugasan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengusahaan Jalan Tol: Studi Penugasan PT Hutama Karya (Persero) Dalam Pengusahaan Jalan Tol Di Sumatera*, Jurnal Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tuturoong, Christian Evert, *et. al.*, *Laporan Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat Mengimplementasikan Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*, ICW.

Solechan, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

World Bank, 2018, *Infrastructure Sector Assessment Program*, The World Bank Office, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Internet

Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, <https://bpjt.pu.go.id/berita/dukungan-pemerintah-dalam-percepatan-pembangunan-proyek-jalan-tol-di-sumatera>

Bisnis.com, <https://market.bisnis.com/read/20170223/192/631163/hutama-karya-jasa-marga-dan-waskita-toll-road-bentuk-pt-hutama-marga-waskita>

Budianto Arif, <https://www.idxchannel.com/economics/peringkat-infrastruktur-indonesia-di-posisi-50-dunia-pemerintah-diminta-genjot-pembangunan>

Detikfinance, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6253245/biaya-tol-trans-sumatera-bengkak-jadi-rp-572-t-ternyata-ini-penyebabnya>

Fauzi Mutia, <https://money.kompas.com/read/2021/09/19/121544826/dihentikan-karena-skandal-apa-itu-laporan-ease-of-doing-business>.

Fitch Ratings, <https://www.fitchratings.com/research/id/corporate-finance/fitch-affirms-hutama-karya-at-bbb-outlook-stable-12-04-2022>

Indonesia-Investment, <https://www.indonesia-investments.com/id/berita/berita-hari-ini/indonesia-membaik-dalam-indeks-daya-saing-global-2014-2015-dari-wef/item5983>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, <https://jdih.bumn.go.id/berita/perubahan-pasal-66-uu-bumn-dengan-uu-cipta-kerja/>

Jayani, Dwi Hadya, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/produk-domestik-bruto-per-kapita-terus-meningkat>

Kata Data, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/14/produk-domestik-bruto-per-kapita-terus-meningkat>

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, <https://jdih.maritim.go.id/pp-602022-penambahan-modal-negara-pada-pt-hutama-karya-persero>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, <https://pu.go.id/berita/tol-trans-sumatera-sebaiknya-dibangun-langsung-pemerintah>

KPPIP, <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>

Kumparan Bisnis, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kinerja-bumn-infrastruktur-waskita-and-hk-rugi-ptpp-wika-adhi-masih-cetak-laba-1vWxgEbcfVL/full>

Laporan Tahunan/Annual Report PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2021.

PT Hutama Karya (Persero), <https://www.hutamakarya.com/strategi-restrukturisasi-dan-penyehatan-keuangan-hutama-karya>

PT Hutama Karya (Persero), <https://www.hutamakarya.com/strategi-restrukturisasi-dan-penyehatan-keuangan-hutama-karya>

Karya Ilmiah

Adhayanti, Dilvita, 2017, *Penugasan PT Pelni (Persero) Sebagai Single Operator Kapal Perintis (Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Hukum Persaingan Usaha)*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kumalasari, Monica Dyah, 2020, *Tanggung Jawab Direksi BUMN Persero dan Pemerintah Atas Potensi Kerugian Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penugasan Pemerintah Sektor Jasa Konstruksi*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Kampus Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mugiaji, Kery, 2020, *Refleksi Sejarah Hukum PT Haleyora Power Mendukung Kinerja PT PLN (Persero) Dalam Menjalankan Tugas Negara Di Sektor Ketenagalistrikan*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Kampus Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Narasumber

Wawancara dengan Ibu Ira Ariani Chaerunisa (Kepala Subdit Legalisasi Rencana Investasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR)), Jakarta, 21 Juni 2021.

Wawancara dengan Ibu Ira Ariani Chaerunisa (Kepala Subdit Legalisasi Rencana Investasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR)), Jakarta, 21 Juni 2022.

Wawancara dengan Ibu Ignatia Oktavia S. (Pj. Manager Unit Legal Jalan Tol Divisi Legal PT Hutama Karya (Persero)), Jakarta, 24 Juni 2022.

Wawancara dengan Bpk. Subarjono (Staf Ahli Departemen Produksi PT Brantas Abipraya (Persero)), Jakarta, 30 Juni 2022.

Wawancara dengan Ibu Ira Ariani Chaerunisa (Kepala Subdit Legalisasi Rencana Investasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR)), Jakarta, 21 Juni 2022.

Wawancara dengan Haryo Indratno (Koordinator Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN), Jakarta, 21 Juli 2022.